



## PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 29 April 2025

Nomor : B/500/422/B.EKBANG-SET/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Triwulan I Provinsi Kepulauan Riau

Yth. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  
Selaku Pokja Daerah TPIP  
di  
Tempat

### **I. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH DAN ATAU PERKEMBANGAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN PENTING, BARANG LAINNYA DAN JASA SERTA RESIKO KE DEPAN**

Pada Maret 2025, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan inflasi sebesar 0,38% (mtm) meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,14% (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 2,01% (yoy) yang melandai dibanding bulan sebelumnya sebesar 2,09% (yoy) dan masih berada di rentang sasaran. Secara spasial, Inflasi (yoy) tertinggi terjadi di Kota Batam sebesar 2,53 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,80 dan terendah terjadi di Kota Tanjungpinang sebesar 0,07 persen dengan IHK sebesar 105,05. Sedangkan Kabupaten Karimun inflasi (yoy) sebesar 0,15 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,77. Dengan demikian, secara tahunan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan inflasi sebesar 2,01% (yoy) atau secara tahun kalender tercatat sebesar 0,67% (ytd).

Adapun komoditas utama penyebab Inflasi Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret 2025 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya delapan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 2,31 persen; kelompok pakaian dan alas kaki mengalami kenaikan sebesar 1,19 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 1,61 persen; kelompok kesehatan naik sebesar 0,52 persen; kelompok transportasi naik sebesar 1,71 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik sebesar 0,73 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik sebesar 3,07 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 10,03 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga turun sebesar 0,25 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,10 persen; serta kelompok pendidikan turun sebesar 1,87 persen.

Dengan perkembangan tersebut, pada bulan Maret 2025 perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau mencatat Inflasi sebesar 0,38% (mtm), inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,66 pada Februari 2025 menjadi 108,07 pada Maret 2025. Sedangkan tingkat inflasi sebesar 0,67% (ytd).

Kenaikan inflasi triwulan I menunjukkan adanya perkembangan harga berbagai komoditas pada Maret 2025 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau di 3 Kabupaten/Kota, pada Maret 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,01 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,94 pada Maret 2024 menjadi 108,07 pada Maret 2025. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,38 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 0,67 persen.

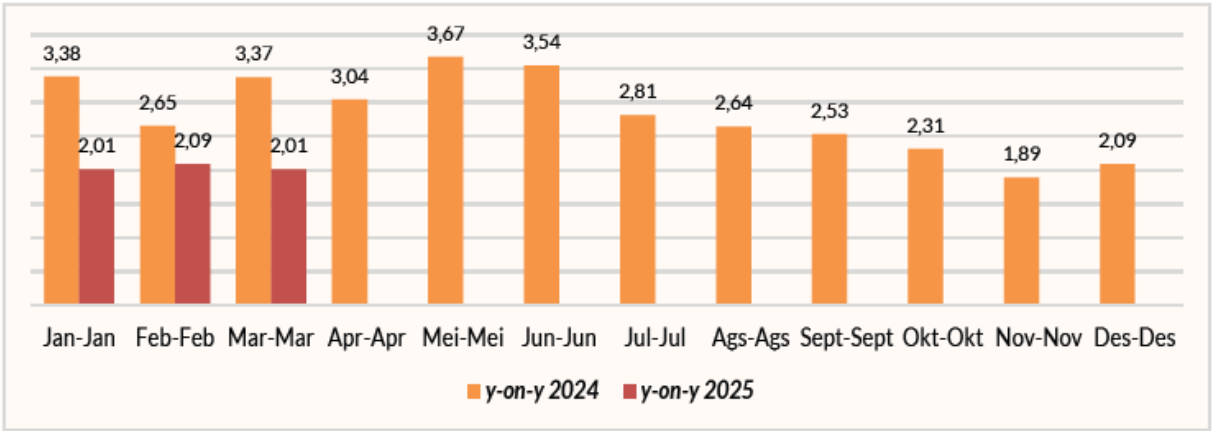
Tabel 1. IHK dan Tingkat Inflasi *Month to Month* (mtm), *Year to Date* (ytd), dan *Year on Year* (yoy) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Maret 2025

Kelompok Pengeluaran	IHK Maret 2024	IHK Desember 2024	IHK Maret 2025	Tingkat Inflasi m-to-m Maret 2025 <sup>1</sup> (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Maret 2025 <sup>2</sup> (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Maret 2025 <sup>3</sup> (%)	Andil Inflasi m-to-m Maret 2025 (%)	Andil Inflasi y-on-y Maret 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum	105,94	107,35	108,07	0,38	0,67	2,01	0,38	2,01
Makanan, Minuman, dan Tembakau	109,16	110,31	111,68	-0,21	1,24	2,31	-0,07	0,69
Pakaian dan Alas Kaki	105,34	106,32	106,59	0,57	0,25	1,19	0,03	0,06
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,89	105,23	104,55	2,33	-0,65	1,61	0,36	0,25
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,11	101,60	101,85	0,02	0,25	-0,25	~0	-0,01
Kesehatan	103,72	104,11	104,26	~0	0,14	0,52	~0	0,01
Transportasi	110,79	112,86	112,69	-0,14	-0,15	1,71	-0,02	0,24
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,06	99,97	99,96	-0,03	-0,01	-0,10	~0	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,25	102,08	101,99	~0	-0,09	0,73	~0	0,01
Pendidikan	104,19	102,23	102,24	~0	0,01	-1,87	~0	-0,13
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	101,68	103,02	104,80	0,02	1,73	3,07	~0	0,29
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	108,30	114,87	119,16	1,16	3,73	10,03	0,08	0,61

Catatan: <sup>1</sup>Persentase perubahan IHK Maret 2025 terhadap IHK Februari 2025, <sup>2</sup>Persentase perubahan IHK Maret 2025 terhadap IHK Desember 2024, <sup>3</sup>Persentase perubahan IHK Maret 2025 terhadap IHK Maret 2024  
~0: Data sangat kecil/mendekati 0

Tabel 2. Tingkat Inflasi *Month to Month* (mtm), *Year to Date* (ytd), dan *Year on Year* (yoy) Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2025 (Persen)

Tingkat Inflasi	Maret 2025
(1)	(3)
Month to Month (m-to-m)	0,38
Year to Date (y-to-d)	0,67
Year on Year (y-on-y)	2,01



Inflasi Kepulauan Riau pada triwulan I tahun 2025 menunjukkan upaya pengendalian inflasi yang tetap terjaga tersebut sejalan dengan konsistensi kebijakan moneter serta sinergi kuat pengendalian inflasi baik di Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) maupun di Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

## II. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Inflasi Provinsi Kepulauan Riau, bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2025 tetap terkendali dalam rentang sasaran, pada Januari 2025 inflasi sebesar 2,01% (yoy), sedangkan inflasi bulan Maret 2025 sebesar 2,01% (yoy). Sasaran inflasi nasional diperkirakan masih terkendali pada sekitar batas atas kisaran target  $2,5 \pm 1\%$ .

Beberapa permasalahan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan I Tahun 2025 antara lain:

1. Inflasi tahunan Provinsi Kepulauan Riau relatif lebih tinggi yang utamanya diakibatkan oleh kenaikan harga emas yang menyumbang andil inflasi sebesar 0,56% (yoy) sebagai dampak kenaikan harga emas global;
2. Inflasi tahunan juga di dorong oleh sewa rumah yang naik di Kota Batam sebagai dampak lanjutan kenaikan tarif listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) Batam per 1 Juli 2024 yang hanya terjadi di Kota Batam;
3. Dampak lanjutan diskon tarif listrik sebesar 50% kepada konsumen pasca bayar rumah tangga dan pelaku usaha kecil dengan daya hingga 2.200 VA;
4. Inflasi Maret 2025 terutama di dorong oleh Kelompok Perumahan, Air Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang memberikan andil inflasi sebesar 0,36% (mtm) terutama di sumbang oleh peningkatan tarif listrik akibat normalisasi pasca diskon;
5. Andil tarif listrik yang *relative* rendah di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh tidak berlakunya program diskon tarif listrik di Batam periode Januari - Februari 2025, sehingga Kota Batam tidak mengalami normalisasi tarif di Bulan Maret seperti yang terjadi di hampir semua provinsi lainnya di Indonesia;
6. Penyesuaian harga BBM non subsidi per 1 Maret 2025;
7. Adanya fasilitas pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap tiket pesawat yang dapat menahan kenaikan tarif angkutan udara yang lebih tinggi.

## III. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan I tahun 2025. Beberapa kegiatan di triwulan I ini terkait pengendalian inflasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kepulauan Riau secara konsisten bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif);
2. Rapat Koordinasi Pasar Murah Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadan dan Idul Fitri 2025 Kota Batam;
3. *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Kepulauan Riau serta berbagai Rapat Koordinasi Pasar Murah;
4. *Capacity Building* Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Se-Provinsi Kepulauan Riau;
5. *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang;
6. *Launching* Kedai Pangan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Karimun;
7. Kunjungan ke pasar untuk pemantaun kecukupan stok pangan;
8. Pelaksanaan pasar murah dan gerakan pangan murah;
9. Sidak pasar, *talkshow* radio, dan publikasi informasi melalui media sosial untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali;

10. Sinergi penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah/Operasi Pasar Murah sebanyak 21 kali di berbagai wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

#### IV. EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Beberapa evaluasi terkait kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

1. Meningkatnya permintaan komoditas pangan di tengah momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN);
2. Peningkatan permintaan barang dan jasa menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN);
3. Kegiatan operasi pasar Provinsi Kepulauan Riau akan terus diintensifkan menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idul Fitri di seluruh Kabupaten/Kota, disertai dengan koordinasi melalui *High Level Meeting* (HLM) dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
4. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga terus memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengendalian inflasi melalui Kerja sama Antar Daerah (KAD);
5. Pengawasan untuk memastikan pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan menimbun barang dalam rangka spekulasi;
6. Melakukan komunikasi efektif dengan mengelola ekspektasi inflasi masyarakat untuk itu agar dapat menyampaikan melalui media cetak dan media elektronik;
7. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengendalian bahan pangan pokok strategis;
8. Menghimbau masyarakat untuk membeli barang kebutuhan pokok sesuai kebutuhan;
9. Memonitor dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait kesiapan moda angkutan laut dan udara untuk keamanan dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok strategis;
10. Melakukan upaya pengawasan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terhadap agen-agen tiket angkutan *offline* serta penguatan koordinasi dengan pelaku usaha/maskapai serta otoritas bandara dan pelabuhan.

#### V. REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merekomendasikan beberapa kebijakan pengendalian inflasi kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut:

1. Bank Indonesia akan terus mengantisipasi risiko inflasi melalui sinergi dan koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
2. Normalisasi tarif listrik setelah berakhirnya diskon tarif listrik sebesar 50% kepada konsumen rumah tangga dan pelaku usaha kecil dengan daya hingga 2.200 VA;
3. Meningkatnya *imported inflation* sejalan dengan kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat;
4. Masa peralihan musim (pancaroba) dari musim hujan ke musim kemarau yang dapat berpengaruh terhadap produksi komoditas pangan;
5. Bank Indonesia optimis inflasi Provinsi Kepulauan Riau akan tetap di sasaran inflasi nasional  $2,5 \pm 1\%$  di dorong oleh melandainya harga emas perhiasan, penyesuaian harga BBM non subsidi per 1 April 2025 dan normalisasi permintaan terhadap komoditas pangan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadan dan Idul Fitri Tahun 2025;
6. Terkendalnya inflasi mencerminkan efektivitas kebijakan moneter yang konsisten serta sinergi kuat antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Kepulauan Riau  
Sekretaris Daerah,



Adi Prihantara

Tembusan:

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau.